



## Tata Kelola Ekowisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal di Kawasan Konservasi Ngadas, Malang

M. Hamdi HS<sup>1</sup>, Setyo Utomo<sup>2</sup>, Itok Wicaksono<sup>3</sup>, Retna Anggitaningsih<sup>4</sup>,  
I Gusti Made Darma<sup>5</sup> Syamsul Hadi<sup>6</sup> Edhi Siswanto<sup>7</sup> Mashudi<sup>8</sup>

<sup>1, 3, 6, 7</sup> Universitas Muhammadiyah Jember

<sup>2</sup> Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi

<sup>4, 8</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>5</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Marta Martapura

email: hamdi.hs@unmuhjember.ac.id

email: setyoutomo@ubibanyuwangi.ac.id

email: itokwicaksono@unmuhjember.ac.id

email: retnaiaain1974@gmail.com

email: igustimadedarma04@gmail.com

email: syamsul.hadi@unmuhjember.ac.id

email: [edhiswanto@unmuhjember.ac.id](mailto:edhiswanto@unmuhjember.ac.id)

email: [mashudi88@lecturer.uinkhas.ac.id](mailto:mashudi88@lecturer.uinkhas.ac.id)

This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution 4.0 International  
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Copyright (c) 2026 Sadar  
Wisata: Jurnal Pawirisata



**Corresponding Author:** M. Hamdi HS, Universitas Muhammadiyah Jember, hamdi.hs@unmuhjember.ac.id

**Received Date: 2 February 2026**

**Reviewed Date: 15 March 2026**

**Accepted Date: 12 June 2026**

### Artikel Info

Kata kunci:  
ekowisata  
berkelanjutan,  
kearifan lokal,  
collaborative  
governance,  
kebijakan publik

*Keywords:*  
*sustainable  
ecotourism, local  
wisdom,  
collaborative  
governance, public  
policy*

### Abstrak

Pengelolaan ekowisata di kawasan konservasi menghadapi tantangan kompleks akibat ketegangan antara tujuan konservasi, kepentingan ekonomi, dan dinamika sosial masyarakat lokal. Kondisi tersebut menuntut model tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal masyarakat Tengger di Desa Ngadas serta mengkaji perannya dalam memperkuat keberlanjutan kawasan konservasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan secara tematik dan kelembagaan untuk memahami relasi aktor, struktur kebijakan, serta dinamika sosial-ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata masih didominasi pendekatan hierarkis, sehingga partisipasi masyarakat bersifat prosedural dan kearifan lokal belum terinstitusionalisasi secara memadai dalam kebijakan formal. Kondisi ini berdampak pada lemahnya legitimasi kebijakan dan risiko ketidakseimbangan antara perlindungan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka collaborative governance merupakan strategi kunci untuk meningkatkan kapasitas adaptif kebijakan dan keberlanjutan ekowisata di kawasan konservasi.

### Abstract

*Ecotourism management in conservation areas faces complex challenges arising from tensions between conservation objectives, economic interests, and local socio-cultural dynamics. These conditions require adaptive, collaborative, and context-sensitive governance models. This study aims to analyze the implementation of ecotourism management policies based on the local wisdom of the Tengger community in Ngadas Village and to examine their role in strengthening conservation sustainability. A qualitative case study approach was employed, using in-depth interviews, field observations, and policy document analysis. Data were analyzed thematically and institutionally to capture actor relations, policy structures, and socio-ecological*

*dynamics. The findings reveal that ecotourism governance remains dominated by hierarchical approaches, resulting in procedural community participation and insufficient institutionalization of local wisdom in formal policies. This situation weakens policy legitimacy and increases the risk of imbalance between ecological protection and community welfare. The study concludes that integrating local wisdom into a collaborative governance framework is essential for enhancing policy adaptability and achieving sustainable ecotourism in conservation areas.*

---

## PENDAHULUAN

Pariwisata berkelanjutan berkembang sebagai paradigma dominan dalam pengelolaan destinasi wisata yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sosial-budaya. Paradigma ini menempatkan pariwisata sebagai instrumen strategis pembangunan yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian ekosistem dan penguatan kohesi sosial (Tuna, 2012). Perkembangan tersebut menuntut model tata kelola destinasi yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang agar aktivitas wisata tidak melampaui daya dukung lingkungan dan sosial (Zaenuri et al., 2021).

Kawasan konservasi, khususnya taman nasional, menjadi ruang krusial dalam penerapan pariwisata berkelanjutan karena memadukan fungsi perlindungan ekologi dan pemanfaatan wisata. Karakteristik kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi menjadikan aktivitas pariwisata berpotensi menimbulkan tekanan ekologis apabila tidak dikelola secara hati-hati (Supranoto, 2022). Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan tata kelola yang mampu mengintegrasikan tujuan konservasi dengan kepentingan ekonomi wisata secara seimbang dan terkendali (Hamdi et al., 2023).

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merepresentasikan kawasan konservasi yang menghadapi tekanan multidimensional akibat intensitas aktivitas pariwisata yang terus meningkat. Keunggulan lanskap alam dan kekayaan budaya masyarakat Tengger menjadikan kawasan ini sebagai destinasi unggulan nasional dan internasional. Peningkatan kunjungan wisata memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, namun secara simultan memunculkan risiko degradasi lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang apabila tata kelola kawasan tidak dijalankan secara efektif (Sharpley, 2022).

Keberhasilan pariwisata di kawasan konservasi tidak dapat diukur semata-mata melalui indikator jumlah kunjungan dan pendapatan ekonomi. Keberlanjutan destinasi sangat ditentukan oleh kemampuan sistem tata kelola dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan wisata, konservasi, dan harmoni sosial masyarakat lokal (Saksana & Thio, 2019). Pengabaian aspek tata kelola berkelanjutan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan memicu ketegangan sosial yang justru melemahkan daya saing destinasi wisata (Tuna, 2012).

Pengelolaan ekowisata dalam perspektif kebijakan publik merupakan hasil interaksi kompleks antara aktor negara dan non-negara dalam proses perumusan serta implementasi kebijakan. Dominasi pendekatan top-down dalam kebijakan pengelolaan kawasan konservasi sering kali menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas sosial di tingkat lokal (Saksana & Thio, 2019). Kesenjangan tersebut muncul karena kebijakan formal belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika sosial-budaya masyarakat yang hidup dan bergantung pada kawasan konservasi (Logunova et al., 2022).

Masyarakat Tengger memiliki kearifan lokal yang berfungsi sebagai sistem nilai dalam mengatur relasi manusia dan alam di kawasan Bromo. Nilai, norma, dan praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun berperan sebagai mekanisme sosial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan ketertiban sosial (Sharpley, 2022). Kearifan lokal tersebut berpotensi menjadi modal sosial strategis apabila diintegrasikan secara substantif dalam kebijakan pengelolaan ekowisata (Hamdi et al., 2023).

Pendekatan *community-based ecotourism* diakui sebagai strategi efektif dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di kawasan konservasi. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan wisata sehingga manfaat ekonomi dapat terdistribusi secara lebih adil (Saksana & Thio, 2019). Keterlibatan aktif masyarakat juga memperkuat kontrol sosial terhadap aktivitas wisata yang berpotensi merusak lingkungan (Logunova et al., 2022).

Implementasi ekowisata berbasis masyarakat masih menghadapi berbagai kendala struktural dan institusional di banyak kawasan konservasi. Kebijakan pengelolaan wisata yang berorientasi administratif cenderung membatasi ruang partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan strategis (Paradza et al., 2020). Kondisi tersebut menyebabkan kearifan lokal belum terinstitusionalisasi

secara optimal dalam kebijakan formal dan melemahkan efektivitas pengelolaan ekowisata (Khan et al., 2020).

Dinamika pengelolaan ekowisata di Desa Ngadas menunjukkan kompleksitas relasi antara regulasi konservasi dan praktik sosial ekonomi masyarakat lokal. Regulasi yang ketat terkait zonasi dan pemanfaatan kawasan sering kali berhadapan dengan kebutuhan ekonomi dan tradisi pemanfaatan ruang yang telah berlangsung lama. Ketidakselarasan tersebut berpotensi memicu konflik sosial dan menurunkan kualitas tata kelola kawasan apabila tidak dikelola melalui pendekatan kolaboratif (Yuliaty et al., 2021).

Permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata di Desa Ngadas dapat dipetakan secara sistematis melalui identifikasi aktor, bentuk persoalan, dan implikasinya terhadap keberlanjutan kawasan. Penyajian data dalam bentuk tabel berfungsi sebagai instrumen analitis untuk memperjelas keterkaitan antarvariabel kebijakan, kelembagaan, dan sosial-budaya. Pendekatan ini memperkuat basis empiris dalam merumuskan rekomendasi tata kelola ekowisata yang lebih adaptif dan berkelanjutan (Atmodjo et al., 2020).

Berikut gambaran permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata di Desa Ngadas yang mengemuka di masyarakat.

**Tabel 1 Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ekowisata di Desa Ngadas**

No.	Aspek Pengelolaan	Permasalahan Utama	Aktor Terkait	Implikasi terhadap Keberlanjutan Ekowisata
1.	Kebijakan dan Regulasi	Kebijakan bersifat top-down dan kurang adaptif terhadap konteks sosial lokal	Balai TNBTS, Pemerintah Daerah	Efektivitas kebijakan rendah dan resistensi masyarakat
2.	Partisipasi Masyarakat	Pelibatan masyarakat terbatas pada tahap operasional wisata	Masyarakat Tengger, Pengelola Wisata	Rendahnya rasa memiliki dan keberlanjutan sosial
3.	Integrasi Kearifan Lokal	Nilai dan praktik adat belum terakomodasi dalam kebijakan formal	Komunitas Adat Tengger, Negara	Potensi konflik sosial dan budaya
4.	Koordinasi Kelembagaan	Koordinasi antarinstansi pengelola belum optimal	Kementerian LHK, Pemda, Desa	Tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi kebijakan
5.	Keberlanjutan Lingkungan	Tekanan wisata terhadap daya dukung ekosistem kawasan	Wisatawan, Pengelola Kawasan	Risiko degradasi lingkungan jangka panjang

Sumber: Hasil Observasi Awal Penelitian (2024)

Data pada tabel memperlihatkan bahwa permasalahan pengelolaan ekowisata bersifat saling terkait antara dimensi kebijakan, kelembagaan, dan sosial-budaya. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa kegagalan atau keberhasilan pengelolaan tidak dapat dijelaskan melalui satu variabel tunggal, melainkan melalui interaksi antarkomponen tata kelola. Temuan ini menegaskan urgensi penggunaan pendekatan integratif dalam menganalisis implementasi kebijakan ekowisata, terutama pada kawasan konservasi yang memiliki karakter sosial dan budaya lokal yang kuat.

Celah analisis penelitian terletak pada belum optimalnya integrasi kearifan lokal masyarakat Tengger dalam implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa sebagian besar kajian ekowisata masih berfokus pada aspek konservasi lingkungan dan kinerja ekonomi destinasi, sementara dimensi implementasi kebijakan publik di tingkat lokal relatif kurang mendapat perhatian. Kekosongan kajian tersebut mengindikasikan perlunya analisis yang menjelaskan praktik

kebijakan di tingkat tapak serta faktor institusional dan sosial yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan ekowisata.

Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada integrasi analisis implementasi kebijakan publik dengan pendekatan ekowisata berbasis kearifan lokal dalam konteks kawasan konservasi. Integrasi tersebut menempatkan kearifan lokal tidak sekadar sebagai atribut budaya, tetapi sebagai sumber daya institusional yang dapat memperkuat tata kelola kolaboratif antara negara dan masyarakat. Perspektif ini memperluas pemahaman pengelolaan ekowisata sebagai proses sosial-administratif yang adaptif terhadap dinamika lokal dan perubahan lingkungan kebijakan.

Permasalahan penelitian dirumuskan pada pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal masyarakat Tengger di Desa Ngadas serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Rumusan tersebut diarahkan untuk mengkaji secara empiris hubungan antara desain kebijakan, praktik implementasi, dan peran aktor lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi. Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis implementasi kebijakan ekowisata di Desa Ngadas, mengidentifikasi kontribusi kearifan lokal dalam memperkuat tata kelola, serta merumuskan implikasi konseptual bagi pengembangan ekowisata berkelanjutan yang selaras dengan konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan pemaknaan para aktor lokal terhadap tata kelola ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Ngadas, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu menggali realitas sosial yang dibentuk melalui interaksi, nilai budaya, dan praktik kelembagaan dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan (Ahyar et al., 2020).

Pelaksanaan penelitian dilakukan secara naturalistik dengan peneliti sebagai instrumen utama. Informan ditentukan secara purposive dan dikembangkan melalui teknik snowball, melibatkan tokoh adat masyarakat Tengger, pengelola wisata lokal, aparatur desa, serta pihak pengelola kawasan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumen kebijakan yang relevan dengan pengelolaan ekowisata dan kelembagaan lokal.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis fenomenologis melalui tahapan reduksi data, pengelompokan pernyataan signifikan, pembentukan tema-tema esensial, dan sintesis makna pengalaman informan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, member checking, serta diskusi sejawat untuk memastikan kredibilitas, konsistensi, dan keterandalan temuan penelitian (Ahyar et al., 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata di Desa Ngadas menunjukkan paradoks struktural antara tujuan normatif konservasi dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat lokal. Kebijakan konservasi yang dirancang negara berangkat dari rasionalitas ekologi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem melalui regulasi kawasan, zonasi, dan pembatasan aktivitas ekonomi, sebagaimana umum diterapkan pada kawasan lindung (Logunova et al., 2022). Realitas di tingkat lokal memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena kebutuhan ekonomi dan praktik sosial masyarakat Tengger terus berinteraksi dengan ruang konservasi. Ketegangan ini mencerminkan problem klasik tata kelola kawasan konservasi, ketika orientasi ekologi negara belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan adaptif komunitas lokal, sehingga keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuannya merespons kompleksitas sosial dan budaya setempat (Putri & Idajati, 2019).

Struktur kebijakan dan regulasi menjadi determinan utama yang membentuk pola pengelolaan ekowisata di Desa Ngadas. Desain kebijakan yang hierarkis menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam pengambilan keputusan strategis, suatu pola yang oleh (Paradza et al., 2020) disebut sebagai ciri kebijakan publik berorientasi kontrol. Konsekuensinya, masyarakat Tengger lebih sering diposisikan sebagai pelaksana teknis pada level operasional, sementara ruang deliberasi substantif relatif terbatas. Ketidakseimbangan relasi ini menciptakan jarak antara kebijakan formal dan praktik sosial, karena pengetahuan lokal dan pengalaman historis masyarakat belum terakomodasi secara memadai. Kondisi tersebut menguatkan temuan bahwa kegagalan implementasi kebijakan publik sering

berakar pada ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan konteks lokal tempat kebijakan dijalankan (Yuliaty et al., 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata masih menunjukkan karakter prosedural dan bersifat instrumental. Keterlibatan masyarakat Tengger umumnya difokuskan pada aktivitas ekonomi wisata, seperti jasa transportasi dan pemandu wisata, yang oleh (Sentanu et al., 2023) dikategorikan sebagai partisipasi fungsional. Akses masyarakat terhadap proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan masih sangat terbatas, sehingga aspirasi lokal tidak terintegrasi secara substantif. Pola partisipasi semacam ini menghasilkan relasi yang asimetris antara negara dan masyarakat, serta berpotensi melemahkan legitimasi kebijakan. Sejalan dengan temuan (Yuliaty et al., 2021), partisipasi yang bersifat simbolik justru dapat menghambat keberlanjutan pariwisata dalam jangka panjang.

Terakai dengan paradoks implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata di Desa Ngadas tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 2 Paradoks Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ekowisata di Desa Ngadas**

No.	Dimensi Analisis	Orientasi Kebijakan Normatif	Realitas Implementasi di Tingkat Lokal	Bentuk Paradoks Struktural	Implikasi Tata Kelola Ekowisata
1.	Tujuan Konservasi	Perlindungan ekosistem melalui regulasi kawasan, zonasi, dan pembatasan aktivitas ekonomi	Aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergantung pada ruang konservasi	Ketegangan antara rasionalitas ekologi negara dan kebutuhan ekonomi lokal	Keberlanjutan ekologis belum sepenuhnya sejalan dengan kesejahteraan masyarakat
2.	Struktur Kebijakan	Kebijakan hierarkis dan terpusat pada negara	Implementasi menghadapi adaptasi dan resistensi lokal	Jarak antara desain kebijakan dan konteks sosial-budaya	Efektivitas implementasi kebijakan relatif rendah
3.	Peran Aktor	Negara sebagai pengambil keputusan strategis	Masyarakat berperan sebagai pelaksana teknis	Relasi kekuasaan yang asimetris	Lemahnya rasa memiliki dan legitimasi kebijakan
4.	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi diakui secara normatif	Partisipasi terbatas pada aktivitas ekonomi wisata	Partisipasi bersifat prosedural dan instrumental	Aspirasi lokal tidak terintegrasi dalam kebijakan
5.	Integrasi Pengetahuan Lokal	Pengelolaan berbasis regulasi formal	Pengetahuan dan praktik lokal belum terakomodasi	Ketidaksinkronan kebijakan dengan realitas lokal	Kebijakan kurang adaptif dan kontekstual

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Kondisi paradoks struktural yang teridentifikasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan ekowisata di Desa Ngadas tidak berdiri secara terpisah antar dimensi, melainkan membentuk suatu rangkaian persoalan yang saling memperkuat. Ketegangan antara tujuan konservasi dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat berkelindan dengan desain kebijakan yang hierarkis, sehingga menciptakan ruang implementasi yang kaku dan kurang responsif terhadap dinamika lokal. Situasi ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kebijakan untuk beradaptasi dengan struktur sosial dan sistem nilai masyarakat setempat.

Asimetri relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat lokal mempertegas jarak antara kebijakan formal dan praktik pengelolaan ekowisata di lapangan. Dominasi negara dalam pengambilan keputusan strategis membatasi ruang artikulasi kepentingan masyarakat, sehingga partisipasi yang terjadi lebih bersifat administratif daripada deliberatif. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya rasa kepemilikan sosial terhadap kebijakan, yang pada akhirnya berimplikasi pada lemahnya legitimasi dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekowisata.

Keterbatasan integrasi pengetahuan dan praktik lokal semakin menguatkan karakter kebijakan yang kurang adaptif dan kontekstual. Kebijakan yang bertumpu pada rasionalitas teknokratis cenderung mengabaikan sistem pengetahuan lokal yang telah lama mengatur relasi masyarakat dengan lingkungan. Ketidakhadiran kearifan lokal dalam kerangka formal kebijakan menyebabkan terjadinya disonansi antara aturan tertulis dan praktik sosial, sehingga kebijakan kehilangan daya lenturnya dalam merespons kompleksitas sosial-ekologis kawasan konservasi.

Posisi kearifan lokal masyarakat Tengger sebagai elemen strategis memperlihatkan peluang transformatif yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nilai-nilai adat yang mengedepankan harmoni manusia dan alam memiliki potensi untuk berfungsi sebagai perangkat tata kelola informal yang memperkuat kepatuhan sosial dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam. Ketika kearifan lokal hanya diposisikan sebagai ornamen budaya pariwisata, fungsi regulatif dan adaptifnya menjadi tereduksi. Padahal integrasi pengetahuan lokal ke dalam kebijakan formal mampu meningkatkan ketahanan sosial-ekologis dan memperkuat keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi.

Koordinasi kelembagaan antaraktor pengelola kawasan masih menjadi persoalan struktural yang signifikan. Relasi antara pengelola taman nasional, pemerintah daerah, dan pemerintah desa belum didukung oleh mekanisme koordinasi yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga pengelolaan ekowisata cenderung berjalan sektoral. Fragmentasi kebijakan dan tumpang tindih kewenangan memperlemah kapasitas tata kelola lintas sektor yang dibutuhkan dalam kawasan konservasi. Situasi ini mengonfirmasi argumen (Ansell & Gash, 2008) bahwa absennya tata kelola kolaboratif menjadi hambatan utama dalam kebijakan publik multi-aktor. Temuan tersebut juga sejalan dengan analisis (Hamdi et al., 2023) yang menekankan pentingnya desain kelembagaan kolaboratif untuk mengatasi persoalan lintas sektor.

Tekanan terhadap keberlanjutan lingkungan semakin meningkat seiring dengan intensifikasi aktivitas wisata di kawasan TNBTS. Kebijakan pengelolaan belum sepenuhnya menjadikan daya dukung ekologis sebagai dasar operasional dalam pengambilan keputusan, sehingga aktivitas wisata terkonsentrasi pada titik-titik tertentu yang rentan. (R.A.W. Rhodes, 2017) menegaskan bahwa konsentrasi aktivitas wisata tanpa pengendalian daya dukung berpotensi mempercepat degradasi ekosistem. Kesenjangan antara prinsip keberlanjutan dan praktik pengelolaan menunjukkan lemahnya kapasitas kebijakan dalam menginternalisasi batas ekologis. Temuan ini menguatkan pandangan (Bojang, 2021) bahwa pariwisata di kawasan konservasi berisiko menggerus fondasi keberlanjutannya sendiri tanpa pengelolaan berbasis ekologi.

Interaksi antara kebijakan, kelembagaan, sosial, dan ekologis membentuk sistem pengelolaan ekowisata yang bersifat kompleks dan adaptif. Gangguan pada satu dimensi akan berdampak langsung pada dimensi lainnya, sehingga pendekatan parsial tidak memadai untuk menjawab tantangan pengelolaan kawasan konservasi. Perspektif sistemik menjadi penting untuk memahami dinamika ini secara utuh, sebagaimana ditekankan dalam kerangka *complex adaptive systems* (Herdiana et al., 2022). Studi (Tsafoutis & Metaxas, 2021) menunjukkan bahwa pariwisata merupakan sistem dinamis yang terus beradaptasi terhadap perubahan sosial dan lingkungan, sehingga kebijakan perlu dirancang secara fleksibel dan reflektif.

Integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan pengelolaan ekowisata berpotensi menjadi strategi transformatif bagi keberlanjutan kawasan konservasi. Kearifan lokal dapat berfungsi sebagai sumber daya institusional yang meningkatkan kepatuhan sosial dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme pengawasan formal, sebagaimana dikemukakan (Atmodjo et al., 2020). Pelembagaan nilai lokal ke dalam kebijakan formal membuka ruang sinergi antara tata kelola negara dan tata kelola komunitas, sehingga kebijakan menjadi lebih adaptif. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa pengelolaan berbasis komunitas memiliki kapasitas adaptif yang lebih tinggi terhadap perubahan lingkungan dan sosial (Nguyen, 2022).

Tabel berikut menyajikan hasil dan pembahasan mengenai tata kelola ekowisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Kawasan Konservasi Ngadas.

**Tabel 3 Tata Kelola Ekowisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal di Kawasan Konservasi Ngadas**

No.	Dimensi Kunci	Temuan Inti	Makna Strategis Tata Kelola
1.	Keberlanjutan Ekologis	Aktivitas wisata melampaui daya dukung pada titik rentan	Ancaman degradasi ekosistem dan erosi keberlanjutan
2.	Desain Kebijakan	Prinsip keberlanjutan belum teroperasionalisasi	Kebijakan kurang adaptif terhadap batas ekologis
3.	Sistem Pengelolaan	Interaksi kebijakan–sosial–ekologi bersifat kompleks	Pendekatan parsial tidak memadai
4.	Kearifan Lokal	Belum terlembaga dalam kebijakan formal	Potensi kontrol sosial belum dimanfaatkan
5.	Relasi Aktor	Dominasi negara dalam pengambilan keputusan	Lemahnya legitimasi dan kepemilikan sosial
6.	Model Tata Kelola	Kolaborasi belum optimal	Kebutuhan collaborative governance
7.	Kontribusi Ilmiah	Integrasi kebijakan publik dan ekowisata lokal	Pergeseran paradigma teknokratis–kontekstual
8.	Implikasi Kebijakan	Kearifan lokal sebagai pilar strategis	Penguatan keberlanjutan dan keadilan sosial

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Kerangka *collaborative governance* relevan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik pengelolaan ekowisata di Desa Ngadas. Kolaborasi antara negara, masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pelaku wisata memungkinkan distribusi peran dan tanggung jawab yang lebih seimbang serta proses pengambilan keputusan yang inklusif. (Utomo & Hamdi, 2025) menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif meningkatkan kapasitas adaptif kebijakan publik dalam menghadapi persoalan kompleks dan lintas sektor. Temuan ini selaras dengan pandangan bahwa kolaborasi menjadi prasyarat utama keberhasilan kebijakan publik kontemporer (Hamdi et al., 2025).

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada integrasi analisis implementasi kebijakan publik dan ekowisata berbasis kearifan lokal. Pengelolaan ekowisata dipahami sebagai proses sosial-administratif yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, struktur kelembagaan, dan sistem nilai lokal yang dinamis. Perspektif ini memperluas kajian pariwisata berkelanjutan dari pendekatan teknokratis menuju pendekatan kontekstual dan transformatif. Temuan ini juga menguatkan diskursus kebijakan publik yang memandang kebijakan sebagai arena interaksi sosial yang kompleks dan adaptif.

Implikasi praktis penelitian ini mengarah pada perlunya reformulasi kebijakan pengelolaan ekowisata yang menempatkan kearifan lokal sebagai pilar utama tata kelola kawasan konservasi. Kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis nilai lokal berpotensi memperkuat keberlanjutan ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan Desa Ngadas dikembangkan sebagai model konseptual pengelolaan ekowisata berkelanjutan di kawasan konservasi Indonesia. Relevansi temuan ini menegaskan urgensi transformasi paradigma kebijakan pariwisata menuju tata kelola yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Ngadas belum berjalan optimal dalam mewujudkan keberlanjutan kawasan konservasi. Dominasi pendekatan kebijakan yang bersifat hierarkis menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan normatif konservasi dan realitas sosial-ekonomi masyarakat Tengger, sehingga partisipasi masyarakat masih bersifat prosedural dan belum terintegrasi secara substantif dalam proses pengambilan keputusan.

Temuan utama menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Tengger belum terinstitusionalisasi secara memadai dalam kebijakan formal, sehingga kebijakan pengelolaan ekowisata cenderung kurang adaptif terhadap konteks sosial-budaya setempat. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya legitimasi kebijakan, terbatasnya rasa kepemilikan sosial, serta meningkatnya risiko ketidakseimbangan antara perlindungan ekologi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola ekowisata berkelanjutan di kawasan konservasi memerlukan pergeseran menuju model collaborative governance yang menempatkan kearifan lokal sebagai sumber daya institusional strategis. Integrasi nilai dan praktik lokal ke dalam desain kebijakan diyakini mampu meningkatkan kapasitas adaptif kebijakan, memperkuat keberlanjutan ekologis, dan mendorong keadilan sosial dalam pengelolaan ekowisata. Arah penelitian selanjutnya perlu difokuskan pada pengembangan model kelembagaan kolaboratif yang operasional dan dapat direplikasi pada destinasi konservasi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Atmodjo, E., Lamers, M., & Mol, A. P. J. (2020). Governing Dynamics in Marine Conservation Tourism in Raja Ampat, Indonesia. *Tourism Planning and Development*, 17(6), 655–673. <https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1686652>
- Bojang, M. B. S. (2021). Public Value Management: An Emerging Paradigm in Public Administration. *International Journal of Business, Management and Economics*, 2(4), 225–238. <https://doi.org/10.47747/ijbme.v2i4.395>
- Hamdi, M., Muhammadiyah, I. G. El, & Darma, I. G. M. (2025). Kompleksitas Governansi Dan Kelembagaan Wisata Bahari Di Watu Ulo, Jember. *Politico*, 11(1), 45–52.
- Hamdi, M., Soepeno, B., & Suryawati, D. (2023). *Paradigm Of New Institutional Administrations in The Governance and Institutionalization of Marine Tourism in Payangan , Indonesia*. 10(4), 481–493.
- Herdiana, D., Royani, Y. M., & Wahidah, I. (2022). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara The Public Value of e-Government at The Village Level*. 14(1), 78–90.
- Khan, M. A., Popp, J., Talib, M. N. A., Lakner, Z., Khan, M. A., & Oláh, J. (2020). Asymmetric impact of institutional quality on tourism inflows among selected asian pacific countries. *Sustainability (Switzerland)*, 12(3), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su12031223>
- Logunova, N., Chernyi, S., Zinchenko, E., Krivoguz, D., Sokolov, S., & Nyrkov, A. (2022). Structural and Logical Model of Transport Maritime Functioning Based on Modeling Information Technology. *Economies*, 10(1). <https://doi.org/10.3390/economies10010005>
- Nguyen, B. (2022). Does Local Environmental Governance Improve Tourism Companies' Performance? Evidence from Vietnam. *Journal of Travel Research*, 61(4), 747–761. <https://doi.org/10.1177/00472875211002653>
- Paradza, G., Mokwena, L., & Musakwa, W. (2020). Could mapping initiatives catalyze the interpretation of customary land rights in ways that secure women's land rights? *Land*, 9(10). <https://doi.org/10.3390/LAND9100344>
- Putri, S. D., & Idajati, H. (2019). Karakteristik Kawasan Wisata Pantai Paseban Berdasarkan Konsep Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Jember. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2), 263–268. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i2.33543>
- R.A.W. Rhodes. (2017). Understanding Governance 20 Years On. *Understanding Governance*, 1–29. <http://www.raw-rhodes.co.uk/wp-content/uploads/2017/07/National-Governance-Review.pdf>
- Saksana, A. C., & Thio, S. (2019). Atribut-Atribut Yang Dinilai Penting Oleh Wisatawan Domestik Dan Wisatawan Cina Dalam Memilih Hotel Di Bali. *Jurnal Manajemen Perhotelan*, 5(1), 9–17. <https://doi.org/10.9744/jmp.5.1.9-17>
- Sentanu, I. G. E. P. S., Haryono, B. S., Zamrudi, Z., & Praharjo, A. (2023). Challenges and successes

- in collaborative tourism governance: A systematic literature review. *European Journal of Tourism Research*, 33(2023), 1–29. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v33i.2669>
- Sharpley, R. (2022). Sustainable tourism governance: local or global? *Tourism Recreation Research*. <https://doi.org/10.1080/02508281.2022.2040295>
- Supranoto. (2022). *Pendekatan Kelembagaan Dalam Studi Administrasi Publik* (M. H. HS (ed.); 1st ed.). Media Cipta Perkasa.
- Tsafoutis, D., & Metaxas, T. (2021). Fishing tourism in Greece: defining possibilities and prospects. *Sustainability (Switzerland)*, 13(24). <https://doi.org/10.3390/su132413847>
- Tuna, M. (2012). *Ial and E Nvironmental I Mpackts of T Ourism D Evelopment in T Urkey*. November, 16.
- Utomo, S., & Hamdi, M. (2025). Tata Kelola Biaya Transaksi Dalam Layanan Perbankan Digital: Analisis Kelembagaan dan Implikasi Administratif. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan (JPP)*, 7(2), 127–136.
- Yuliaty, C., Kurniasari, N., Triyanti, R., & Zulham, A. (2021). Stakeholders role in economy creative development of maritime culture in alor regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 744(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/744/1/012107>
- Zaenuri, M., Musa, Y., & Iqbal, M. (2021). Collaboration Governance In The Development Of Natural Based Tourism Destinations. *Journal of Government and Civil Society*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.2839>



kreatif · inovatif · tangguh · adaptif



TeamWork



Sinergi



Prestasi

**Diterbitkan Oleh:**

Program studi Perhotelan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember  
Anggota Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (HILDIKTIPARI)

**Alamat Redaksi**

Ruang redaksi Sadar Wisata Program studi DIII Perhotelan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember  
Jl. Karimata No.49 Telp. (0331) 322557 Fax. (0331) 337957 / 322557

**Surel:** [jurnalsadarwisata@unmuhjember.ac.id](mailto:jurnalsadarwisata@unmuhjember.ac.id)

**Laman:** <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/wisata>